

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RANCANG BANGUN BUS PADA TRANSPORTASI PUBLIK DI TERMINAL ARJOSARI

Fauziyah Nur Laili¹, Retno Wulan Sekarsari², Taufiq Rahman Ilyas³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: fauziyahlailii05@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan perbaikan dan pengembangan sistem transportasi publik di Terminal Arjosari dianggap sebagai prioritas utama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Pemerintah, terutama Badan Pengatur Transportasi Darat (BPTD) XI Jawa Timur, telah mengidentifikasi berbagai masalah terutama terkait izin trayek angkutan kota di Malang. Kesenjangan antara jumlah transportasi publik dan tingkat penggunaannya berpotensi merusak kualitas layanan transportasi publik. Masalah-masalah ini dapat secara signifikan mempengaruhi pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh BPTD XI Jawa Timur (Kota Surabaya) dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada deskripsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPTD XI telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, termasuk perbaikan sarana dan prasarana transportasi, perbaikan rute dan jalur transportasi, serta menerapkan uji emisi dan pembatasan usia kendaraan di Terminal Arjosari. Selain itu, terminal itu sendiri telah direvitalisasi, jalan-jalan diperbaiki, dan jumlah armada transportasi ditambah. Pengaturan jadwal transportasi yang efisien dan peningkatan jalur transportasi melalui pengaturan lalu lintas juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan. Faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melibatkan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam organisasi, peraturan yang sesuai, dan kerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian dan TNI. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup regulasi jumlah transportasi yang tidak seimbang, kurangnya kenyamanan dalam menggunakan transportasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas transportasi yang telah disediakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya yang telah dilakukan oleh BPTD XI Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Terminal Arjosari. Upaya ini melibatkan perbaikan infrastruktur, fasilitas, dan jalur transportasi, sambil mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Transportasi Publik

Pendahuluan

Peran transportasi dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Angkutan umum merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai sektor. Kawasan kota Malang adalah tempat berbagai aktivitas penduduk berlangsung, dan untuk mendukung aktivitas ini, infrastruktur dan fasilitas transportasi sangat diperlukan.

Keberadaan Terminal Arjosari harus dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk menciptakan transportasi yang tertib, lancar, aman, dan nyaman. Terminal Bus Arjosari ini mulai beroperasi dan diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 November 1989. Pada

awalnya, terminal ini dikelola oleh Pemerintah Kota Malang. Namun, pada bulan Januari 2016, status terminal ini ditingkatkan menjadi terminal penumpang tipe A. Akibatnya, pengelolaan terminal ini diambil alih oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sesuai dengan UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Kota Malang.

Berkat Stasiun Arjosari, permasalahan terkait perizinan jalur bus dapat diatasi dengan sangat baik. Pembangunan jalan juga dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas dan kecelakaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Perizinan trayek yang tidak tepat dan tidak mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah kendaraan perkotaan dengan kebutuhan pengguna kendaraan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah di bidang transportasi.

Kebijakan perancangan bus untuk angkutan umum ini sejalan dengan salah satu isi keputusan Pemerintah yang mengundang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (LLAJ) Pasal 213 ayat 2b yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun dan mengembangkan angkutan dan prasarana jalan yang ramah lingkungan menjadi acuan visualisasi kendaraan dan prasarana lantai angkutan umum yang disediakan oleh Stasiun Arjosari. Maksud dan tujuan inisiatif ini adalah untuk memantau dan mengatur fleksibilitas dan keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan. Penerapan kebijakan desain bus di Stasiun Arjosari dengan kebijakan stasiun ini bertujuan untuk menyediakan layanan bus yang lebih terjangkau dan efisien secara finansial, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bus untuk berbagai tujuan dan aktivitas. Dengan mengurangi kemacetan lalu lintas melalui penguatan sistem transportasi umum melalui penerapan kebijakan yang tepat, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi perjalanan.

Konteks implementasi kebijakan desain bus pada sistem angkutan umum Stasiun Arjosari mencerminkan kebutuhan mendasar dalam seluruh aspek bisnis, termasuk aspek perekonomian. Pemerintah melalui BPTD XI wilayah Jawa Timur yang terhubung dengan Stasiun Arjosari Kota Malang harus mengidentifikasi permasalahan yang muncul, salah satunya terkait dengan penerbitan izin angkutan kota di Malang. Permasalahan ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Pembukaan rute yang tidak tepat, seperti ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan angkutan umum dengan kebutuhan pengguna bus lainnya, dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan publik yang disediakan pemerintah di bidang transportasi. Solusi penjadwalan transportasi harus dicari untuk menjamin kelancaran lalu lintas serta memperbaiki jalur transportasi melalui sistem rekayasa lalu lintas.

Dalam konteks analisis pilihan masyarakat, faktor pendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum meliputi kualitas sumber daya peralatan, fasilitas manajemen yang tepat, dan dukungan dari instansi angkutan umum seperti polisi dan tentara. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum memadainya sarana transportasi, kurangnya kenyamanan dalam menggunakan sarana transportasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kendaraan. Untuk memperdalam permasalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat, maka judul penelitian ini adalah **"Implementasi Kebijakan Rancang Bangun Bus Pada Transportasi Publik Di Terminal Arjosari"**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi implementasi Kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari?
3. Bagaimana solusi yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi public di Terminal Arjosari.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari.
3. Untuk mengetahui solusi yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Administrasi Publik untuk program sarjana (S-1). Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam implementasi kebijakan terkait angkutan umum.
2. Manfaat Teoritis
Kajian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi acuan dalam penelitian dan implementasi kebijakan publik. Dan semoga dapat menjadi masukan berupa usulan yang patut menjadi bahan pertimbangan pihak kantor Stasiun Arjosari.
3. Manfaat Praktis
Berperan aktif dalam mendukung Terminal Bus Arjosari dalam upaya penyempurnaan kebijakan publik dan melalui kajian ini diharapkan masyarakat lebih memahami implementasi kebijakan tersebut. Buku Operasional Bus di Arjosari stasiun.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Secara umum, dalam ilmu politik, konsep kebijakan publik memiliki beragam definisi. Charles O. Jones (seperti yang disebutkan dalam Budi Winarno, 2014: 19) mengatakan bahwa istilah "kebijakan" sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi sering kali digunakan untuk

merujuk pada aktivitas atau keputusan yang sebenarnya berbeda. Kata ini seringkali diartikan sebagai tujuan, program, keputusan, standar, proposal, atau perancangan besar lainnya. Namun, kebijakan publik, meskipun terlihat abstrak, memiliki konsekuensi nyata yang dapat memengaruhi individu.

Pelanggaran terhadap kebijakan publik bisa mengakibatkan sanksi seperti denda, penjara, atau tindakan hukum sah lainnya. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki unsur "paksaan" yang potensial untuk diterapkan dan dijalankan. Ini berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh organisasi swasta. Artinya, kebijakan publik mengharuskan tingkat ketaatan yang lebih luas dari masyarakat secara umum. Ini adalah ciri khas yang membedakan kebijakan publik dari jenis kebijakan lainnya.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yang mengatur perubahan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal transportasi bus orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dijelaskan standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh para sopir transportasi bus. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi operasional sehari-hari dan tindakan individu dalam sebuah sektor, serta sanksi yang dapat diterapkan jika aturan tersebut dilanggar.

Implementasi kebijakan

Ripley dan Franklin, yang dikutip oleh Winarno (2012), telah menjelaskan bahwa implementasi adalah langkah setelah undang-undang disahkan yang memberikan izin untuk menjalankan program atau kebijakan dengan melibatkan berbagai tindakan dari berbagai pihak, terutama birokrat, untuk menjalankan program tersebut. Grindle juga berpendapat bahwa tugas utama implementasi adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan terwujud melalui tindakan pemerintah.

Sementara itu, Van Meter dan Varn Horn (sebagaimana dikutip oleh Anggara, 2014) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Lester dan Stewart mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan undang-undang yang melibatkan berbagai elemen seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan atau program tersebut.

Dalam konteks implementasi kebijakan rancang bangun bus dalam transportasi publik di Terminal Arjosari, Kota Malang, langkah-langkah mengikuti kerangka kerja implementasi kebijakan yang mencakup beberapa faktor penting seperti

penetapan standar dan tujuan kebijakan, alokasi sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, kegiatan pelaksanaan, serta memperhitungkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Proses implementasi ini termasuk memberikan izin pengoperasian rancang bangun bus sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran transportasi publik. Fokusnya adalah pada pengawasan dan pembinaan yang ketat, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mendefinisikan transportasi publik sebagai layanan jasa angkutan dengan rute tetap. Selain itu, implementasi juga mencakup penerapan standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai bagian dari tugas pengelola angkutan jalan. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi publik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang ditemukan di lapangan, kemudian memberikan interpretasi dan kesimpulan atas temuan tersebut. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengelompokkan dan mengkategorikan data, lalu menganalisisnya secara deskriptif yang berorientasi pada kualitas sehingga dapat menghasilkan pemahaman ilmiah dan definisi yang sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan rancang bangun bus dalam transportasi publik di Terminal Arjosari.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan sebagai inti utama dari studi yang akan dilakukan. Kehadiran fokus penelitian yang terdefinisi dengan baik membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang cerdas mengenai jenis data yang harus dikumpulkan. Dengan adanya fokus penelitian yang konkret ini, peneliti dapat dengan lebih baik merencanakan pengumpulan data yang relevan. Dengan kata lain, fokus penelitian yang terperinci seperti ini memandu peneliti dalam merancang studi dengan lebih efektif dan akan mempermudah pelaksanaan penelitian yang difokuskan melalui indikator teori menurut Van Meter dan Varn Horn (1975) :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Keselamatan dan Keamanan: Memastikan bus di Terminal Arjosari memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan.
2. Sumber Daya Manusia: Penelitian menitikberatkan pada kinerja Kepala

Terminal Arjosari, Bapak Hadi Supeno, sebagai sumber daya utama.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana: Pelaksanaan Kebijakan Rancang Bangun Bus melibatkan berbagai pihak di Terminal Arjosari, dengan peran masing-masing yang memengaruhi implementasi. Terminal Arjosari berperan dalam optimalisasi peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.
4. Sikap Para Pelaksana: di Terminal Arjosari memengaruhi keberhasilan implementasi. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan untuk pengguna trayek bus, termasuk pengoperasian sesuai rancang bangun bus.
5. Komunikasi Antar Organisasi: Selain pengoperasian, Kepala dan bagian Terminal Arjosari memberikan pelatihan mengenai pengoperasian rancang bangun bus kepada pengguna trayek bus. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal serta menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi penumpang.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: Kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang mencakup rancang bangun bus di Terminal Arjosari sebagai bagian dari implementasi kebijakan.
- A. Strategi implementasi kebijakan rancang bangun bus pada terminal arjosari. Registrasi dan identifikasi transportasi bus serta pengemudi, pendidikan berlalu lintas, rancang bangun bus, rekayasa lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas juga termasuk dalam lingkup undang-undang ini. Tujuannya adalah untuk mengatur izin operasional bus di Terminal Arjosari, melakukan pengawasan terhadap izin operasional, serta menganalisis dampak kebijakan perizinan trayek bus terhadap pelayanan transportasi publik di terminal tersebut.
- B. Faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi kebijakan rancang bangun bus di Terminal Arjosari mempengaruhi pelaksanaannya. Faktor pendorong termasuk dukungan dari pimpinan untuk memotivasi petugas terminal Arjosari dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pengguna trayek bus umumnya mendukung dan patuh terhadap kebijakan rancang bangun bus, serta bersedia memahami dan melaksanakannya dengan disiplin. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup waktu yang dibutuhkan oleh petugas untuk memahami kebijakan, ketidakpahaman pengguna trayek bus terhadap kebijakan operasional bus, dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang nomor 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait rancang bangun bus dalam transportasi publik di Terminal Arjosari.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Terminal Arjosari yang berlokasi di Jl. Raden Intan No.1, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Sementara itu, situs penelitian dari studi ini adalah di Terminal Arjosari yang alamatnya sama, yaitu Jl. Raden Intan No.1, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

- a) Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian yang melibatkan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, termasuk pejabat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari, para supir Bus Terminal Arjosari Kota Malang, serta masyarakat yang merupakan pengguna Transportasi Bus Terminal Arjosari Kota Malang.
- b) Data sekunder
Data sekunder merupakan informasi tambahan yang biasanya diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran di berbagai sumber referensi. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang ditemukan dalam peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan transportasi bus dan kebijakan rancang bangun bus di Terminal Arjosari Kota Malang, serta laporan-laporan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan-informan terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara. Pertama adalah wawancara terstruktur, di mana wawancara dilakukan secara cermat dan terorganisir untuk mengidentifikasi masalah yang akan diajukan serta pertanyaan yang akan diberikan. Kedua adalah wawancara tidak

terstruktur, di mana peneliti melakukan wawancara tanpa menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Dengan kata lain, wawancara berlangsung secara spontan dan mengikuti alur yang alami.

b) Observasi

Observasi yang saya lakukan dalam pra penelitian kepada para narasumber di bagian BPTD wilayah XI Provinsi Jawa Timur Jl. Menanggal MGE No. 12 RT.01 RW. 06 Kel. Menanggal, Kec. Gayungan Surabaya 60234. Untuk menghasilkan data yang terperinci pada surat perlengkapan rancang bangun bus pada lokasi terminal tipe A arjosari di Kota Malang dan didapatkan 79 hasil data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD XI Jawa Timur

c) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumentasi adalah pelengkap bagi metode wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD XI Jawa Timur Terminal Tipe A Arjosari melibatkan pengambilan foto dengan subjek penelitian, pengambilan screenshot dari beberapa website, serta pengumpulan data berupa gambar dari website sebagai bagian dari proses penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan mengikuti model interaktif yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16). Model ini melibatkan proses menggabungkan dan menyusun data secara sistematis untuk membentuk pola, kategori, dan unit dasar yang akan menjadi dasar analisis. Prosedur berikut diikuti untuk melakukan analisis data. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah:

a) Pengumpulan Data

Proses pengambilan, pencatatan, dan pengumpulan data secara subyektif sebagai hasil dari teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

b) Kondensasi Data

Kompresi data dilakukan agar data penelitian lebih kuat. Kondensasi data meliputi kegiatan meringkas catatan lapangan dengan memilih topik-topik penting yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dengan demikian data yang telah dipilah memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data lanjutan yang berkaitan dengan Kebijakan rancang bangun bus pada terminal arjosari di kota malang.

c) Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data sebagai pola yang dapat menggambarkan keadaan di lapangan.

d) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal para peneliti bersifat tentatif dan dapat berubah jika bukti tambahan terungkap selama fase pengumpulan data. Kesimpulan awal hanya dapat diterima jika didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten.

Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tujuan memeriksa data yang telah diperoleh. Peneliti menerapkan teknik tertentu dalam pemeriksaan keabsahan data, yang melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas atau kepercayaan dilakukan oleh peneliti dengan memperluas jangkauan observasi, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan verifikasi anggota.
2. Uji ketergantungan atau dependability pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan audit secara menyeluruh.. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing dan peneliti mengaudit seluruh proses penelitian, termasuk menentukan masalah, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, dan penulisan laporan hasil penelitian. Audit ini dilakukan agar penulis dapat bertanggung jawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

Strategi Implementasi Kebijakan Rancang Bangun Bus Pada Terminal Arjosari

Pembuatan peraturan pelaksanaan bertujuan untuk menyusun pedoman yang rinci mengenai proses, persyaratan, dan tata cara perizinan bus di Terminal Arjosari. Ini mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku seperti UU Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009 dan peraturan menteri terkait. Penting bahwa pedoman ini mudah dimengerti oleh semua pihak, termasuk pemohon, regulator, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, kampanye sosialisasi kepada berbagai pihak, seperti masyarakat, sopir bus, dan operator bus, harus dilakukan melalui berbagai cara termasuk seminar, lokakarya, dan media sosial. Lebih lanjut, BPTD XI

Wilayah Jawa Timur Tipe A Arjosari memiliki peran dalam mengawasi dan melaksanakan proses perizinan bus. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi mereka yang terlibat dalam proses perizinan sangat penting. Proses perizinan harus efisien, dan evaluasi rutin membantu mengidentifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan. Penegakan hukum juga diperlukan untuk menjamin kepatuhan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk pertukaran informasi yang lebih baik. Persyaratan dan berkas permohonan perizinan bus dapat ditemukan di situs web Pemerintah Kota Malang.

Trayek angkutan kota dapat dicabut jika terdapat pelanggaran terhadap beberapa ketentuan berikut ini :

1. Ketika perusahaan angkutan tidak mematuhi kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Apabila mereka tidak menjalani perawatan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan untuk menjadi laik jalan.
3. Jika melakukan pengangkutan dengan kapasitas yang melebihi daya angkut yang telah diizinkan oleh kendaraan.
4. Ketika perusahaan mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pencabutan izin bus di Terminal Arjosari dilakukan melalui serangkaian tindakan, yaitu peringatan tiga kali dengan selang waktu satu bulan di antara setiap peringatan. Jika peringatan ini diabaikan atau tidak diindahkan oleh penyelenggara angkutan kota, Dalam kasus pelanggaran ketentuan tersebut, izin trayek perusahaan angkutan kota akan diberhentikan sementara selama satu bulan. Jika dalam periode pembekuan izin tersebut tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara angkutan kota, izin trayek mereka akan dicabut, dan mereka tidak diperbolehkan lagi untuk mengoperasikan bus mereka di terminal tersebut. Penyusunan kebijakan perizinan bus dan pengoperasian di terminal adalah tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan pemangku kepentingan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah kebijakan disusun, sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait, menjelaskan isi kebijakan, manfaatnya, dan tata cara kepatuhan.

Kementerian Perhubungan melalui BPTD XI Jawa Timur Terminal Arjosari bertugas memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai rencana. Proses perizinan harus efisien dan transparan, dan penggunaan teknologi dapat membantu percepatan prosesnya. Pembinaan dan pengawasan terhadap operator bus dan sopir penting untuk layanan

berkualitas dan keselamatan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan masalah dalam implementasi kebijakan. Kebijakan dapat disesuaikan sesuai perkembangan kebutuhan. Dengan strategi implementasi yang baik, kebijakan perizinan bus di Terminal Arjosari dapat berdampak positif pada transportasi publik secara keseluruhan.

Kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di Terminal Arjosari bertujuan memberikan regulasi yang jelas mengenai pengoperasian, perizinan, dan trayek bus di terminal tersebut. Regulasi ini mencakup persyaratan teknis dan keselamatan kendaraan, kualifikasi pengemudi, jadwal perjalanan, dan perizinan operasional. Ada juga upaya konsolidasi trayek untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

Penyusunan Rencana dan Kebijakan pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD XI Jawa Timur Terminal Tipe A Arjosari:

1. Identifikasi kebutuhan transportasi publik di terminal arjosari, termasuk analisis jumlah penumpang dan rute.
2. Menyusun rencana dan kebijakan pengoperasian bus dan trayek bus di Terminal arjosari, termasuk jadwal, tarif, dan standar pelayanan.
3. Melibatkan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, operator transportasi bus, dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari stakeholder, kebijakan yang dihasilkan akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Terminal arjosari dan sarana penunjangnya memadai dan siap untuk menerima jumlah bus dan penumpang yang lebih besar.
6. Tinjau keamanan, kebersihan, dan fasilitas aksesibilitas di terminal arjosari untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para penumpang.
7. Sesuaikan trayek bus dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, termasuk mempertimbangkan lokasi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.
8. Sesuaikan trayek bus dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, termasuk mempertimbangkan lokasi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.
9. Tentukan jadwal keberangkatan dan kedatangan bus yang efisien untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang dengan baik.
10. Berikan akses kepada pengguna untuk melihat jadwal dan status bus, sehingga meningkatkan transparansi dan keandalan layanan.

11. Lakukan pengawasan secara rutin terhadap penerapan kebijakan dan pelayanan bus di terminal.
 12. Pastikan kepatuhan para operator bus terhadap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
 13. Lakukan upaya sosialisasi mengenai kebijakan transportasi publik kepada masyarakat agar mereka dapat memahami manfaatnya serta tanggung jawab yang harus mereka jalankan dalam mendukung implementasi kebijakan ini.
 14. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan transportasi publik
- Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap fasilitas terminal untuk memastikan aksesibilitas yang baik dan penyusunan kebijakan yang terukur. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan, seperti operator bus, pengguna jasa, pemerintah daerah, dan masyarakat umum, penting dalam proses penyusunan kebijakan ini. Infrastruktur terminal juga perlu ditingkatkan untuk menangani volume tinggi penumpang dan kendaraan, termasuk fasilitas yang lebih besar dan peningkatan sistem tiket. Pengawasan operasi bus dan trayek di terminal Arjosari sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Peningkatan kualitas layanan bus, penerapan teknologi modern, evaluasi rutin, edukasi kepada masyarakat, dan penggunaan data dan analisis yang baik juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan sistem transportasi publik ini secara keseluruhan.

Konsultasi dan partisipasi stakeholder melibatkan berbagai pihak terkait operator bus, pengguna jasa, pemerintah daerah, dan masyarakat umum adalah penting dalam menyusun kebijakan Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, yang diterima oleh semua pihak. Konsultasi yang baik membantu mengidentifikasi masalah dan solusi yang tepat. Peningkatan infrastruktur terminal arjosari memastikan terminal arjosari memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk menangani volume penumpang dan kendaraan yang tinggi. Peningkatan fasilitas seperti platform bus yang lebih luas, peningkatan sistem tiket, dan aksesibilitas yang lebih baik untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan efisiensi operasional. Dibutuhkan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap operasi bus dan trayek bus di Terminal Arjosari. Membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Meningkatkan kualitas layanan bus termasuk pelayanan kepada penumpang, kebersihan,

keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan terminal arjosari, seperti sistem manajemen trayek bus berbasis aplikasi atau platform online untuk membeli tiket, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi penumpang. Selama implementasi kebijakan, evaluasi rutin harus dilakukan untuk mengukur dampaknya dan menemukan potensi perbaikan. Kebijakan dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Edukasi kepada masyarakat tentang manfaat menggunakan transportasi publik dan kampanye kesadaran untuk mengurangi kendaraan pribadi juga penting untuk merubah perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Penggunaan data dan analisis yang baik membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan mengidentifikasi tren serta pola perjalanan yang dapat membantu dalam perencanaan trayek bus yang lebih efisien.

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rancang Bangun Bus Pada Terminal Arjosari

Faktor Pendorong

Permintaan dan kebutuhan masyarakat di Terminal Arjosari memainkan peran utama dalam menentukan jumlah bus, trayek, dan perizinan yang diperlukan. Selain itu, kondisi lalu lintas, kemacetan, dan mobilitas di Kota Malang memengaruhi perencanaan trayek dan jadwal bus. Kebijakan mengoptimalkan pelayanan transportasi dengan mempertimbangkan kepadatan lalu lintas dan menghindari konflik antara moda transportasi. Sehingga regulasi dan kebijakan pemerintah Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari ditentukan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD XI Jawa Timur Terminal Tipe A Arjosari yang jelas dan mendukung akan membantu kelancaran implementasi.

Pada tahap implementasi kebijakan, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif dan mengevaluasi dampaknya. Melalui studi ini, dapat diidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dan solusi yang sesuai dalam pelaksanaan kebijakan rancang bangun bus dalam transportasi publik di Terminal Arjosari. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan akan meningkatkan

tingkat dukungan dan kesadaran akan pentingnya transportasi bus yang efisien dan berkelanjutan di Terminal Arjosari. Selain itu, perlu mempertimbangkan faktor keselamatan dan keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Menggunakan bus yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keselamatan akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan tersebut.

Kebijakan transportasi harus mempertimbangkan regulasi pemerintah, studi kelayakan, serta faktor keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam situasi meningkatnya kebutuhan transportasi publik, pemerintah ditekan untuk mendukung pertumbuhan dan perluasan layanan, terutama jika infrastruktur lain terbatas. Dukungan dari masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya juga berperan penting dalam merancang kebijakan transportasi yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transportasi ramah lingkungan, sehingga mendorong penggunaan bus sebagai alternatif. Keseluruhan kebijakan juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan transportasi di wilayah tersebut, ketersediaan infrastruktur, tujuan pembangunan wilayah, serta peran swasta dan masyarakat. Sumber daya, anggaran, dan regulasi juga berperan dalam implementasi kebijakan transportasi bus di Terminal Arjosari.

Faktor Penghambat

Proses perizinan, pengoperasian, dan penetapan trayek bus di Terminal Arjosari melibatkan banyak izin dari pihak berwenang, yang memerlukan investasi finansial besar. Keterbatasan anggaran pemerintah dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti peron dan shelter juga memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Masalah teknis dalam sistem seperti pemesanan tiket online dan monitoring trayek bus juga bisa menjadi hambatan. Keamanan di terminal dan selama perjalanan bus juga merupakan faktor penghambat serius. Penegakan hukum yang efektif penting agar peraturan dan regulasi terkait perizinan, pengoperasian, dan trayek bus diikuti dengan benar.

Kebijakan transportasi seperti ini memerlukan investasi besar dari pemerintah, yang bisa terhambat oleh anggaran yang terbatas. Beberapa pihak mungkin menentang kebijakan baru karena alasan bisnis atau politik, seperti pemilik angkutan pribadi atau perusahaan taksi yang khawatir akan berkurangnya pelanggan. Kendala hukum dan regulasi yang ketat serta persyaratan teknis yang sulit dipenuhi oleh operator bus juga bisa menjadi hambatan. Kepadatan lalu lintas di Kota Malang juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan transportasi bus baru.

Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam peraturan dan kebijakan terkait transportasi bus di

Terminal Arjosari dapat menyulitkan implementasinya. Para pelaku bisnis bus dan pihak terkait mungkin kesulitan memahami dan mematuhi aturan yang ada. Kurangnya sumber daya yang memadai, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antarinstansi, korupsi, kendala teknis, infrastruktur yang tidak memadai, serta kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal juga bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan transportasi bus di Terminal Arjosari. Perubahan politik dan kebijakan yang sering terjadi juga dapat mengganggu kelancaran implementasi kebijakan ini.

Solusi Yang Menjadi Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rancang Bangun Bus Pada Terminal Arjosari

Dalam implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di Terminal Arjosari, terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Masalah perizinan dan regulasi yang rumit dapat diatasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan regulasi terkait operasi bus di terminal. Perlu dilakukan peran aktif dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah untuk merevisi dan mengintegrasikan izin-izin yang diperlukan menjadi satu sistem terpadu. Penggunaan sistem daring (online) untuk pengajuan perizinan juga bisa mempercepat proses.

Ketidakcukupan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi seperti perbaikan jalan, pembangunan terminal yang modern, dan penyediaan tempat parkir yang memadai. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan teknologi transportasi yang lebih maju untuk mengurangi beban lalu lintas bus. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan transportasi bus dapat membantu dalam implementasi kebijakan ini. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk sanksi dan denda yang memadai, perlu diterapkan.

Koordinasi antarinstansi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Komunikasi dan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dan diberi pemahaman lebih baik tentang pentingnya penggunaan transportasi umum dan mematuhi aturan. Kampanye informasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transportasi umum dan keberlanjutan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih lancar.

Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan berbagai strategi, faktor dan solusi berikut adalah kesimpulan dan saran implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari.

Dengan penerapan perizinan yang ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap pengoperasian bus dan trayeknya, diharapkan kualitas layanan transportasi bus di terminal arjosari meningkat. Hal ini termasuk kesiapan armada bus, kualitas kendaraan, keamanan, serta ketepatan waktu dalam menjalankan trayek. Pengurangan kemacetan melalui kebijakan perizinan yang lebih terkontrol dan terbatas. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD XI Jawa Timur Terminal Tipe A Arjosari mengurangi jumlah bus yang beroperasi secara berlebihan. Pengurangan ini dapat membantu mengurangi kemacetan di terminal maupun jalanan sekitarnya. Penyediaan trayek yang efisien dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, pemerintah menyediakan trayek bus yang efisien, meminimalkan duplikasi trayek, dan mengoptimalkan penggunaan armada bus untuk melayani permintaan penumpang dengan lebih baik.

Keselamatan penumpang dalam implementasi kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari merupakan keselamatan penumpang menjadi salah satu prioritas utama. Penerapan perizinan yang ketat membantu memastikan bahwa bus yang beroperasi memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, termasuk kondisi teknis kendaraan dan kualifikasi. pengemudi. Penerapan kebijakan rancang bangun bus pada transportasi publik di terminal arjosari yang komprehensif telah diatur dalam Peraturan Undang Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas keseluruhan sistem transportasi publik di terminal arjosari.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Diperlukan upaya menyeluruh untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada pemilik dan pengemudi bus di Terminal Arjosari, Kota Malang. Pelatihan ini harus mencakup aspek pelayanan yang sesuai dengan standar operasional, perizinan bus, dan pengoperasian bus dengan baik.
2. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sistem trayek bus yang telah ada di Terminal Arjosari, Kota Malang, yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan aplikasi transportasi online di Kota Malang untuk memastikan bahwa terminal Arjosari dapat diakses oleh

penumpang dari berbagai kota dan daerah, sehingga menjadi solusi transportasi yang handal bagi mereka.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Rahardjo Adisasmi (2015). Analisis Kebutuhan Transportasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publication.
- Moleong, J. Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pusat Data dan Analisa Tempo (2020). Sejarah Transportasi Angkatan Bus Jakarta. Jakarta: TEMPO Publishing. 2020
- Riant Nugroho (2021). Kebijakan Public (Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2021
- Rudi Azis (2014). Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi. Yogyakarta: Deepublish. 2014
- Agus Pambagio (2013). Protes Transportasi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. 2013
- S. Aminah (2016). Penataan Transportasi Public Privat Dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat. Surabaya: Airlangga University Press Sakti Adji Adisasmita (2015) Perencanaan Sistem Transportasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Dr. Ajat Rukajat, M.MPd. (2018) Pendekatan Penelitian Kualitatif (QUALITATIVE RESEARCH APPROACH). Yogyakarta: Deepublish
- Jonathan Sarwono dan Umi Narimawati (2015). Skripsi Tesis Dan Disertai Dengan Partial Least Square SEM. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. (1997). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi Nur Khaerat Nur, Pareta Rusan Rangun, Mahyuddin, Hasmar Halim, Miswar Tumpa, Gito Sugiyanto, Louise Elizabeth, Siti Nurjanah, Eli Ekayanti. (2021). Sistem Transportasi Penerbit: Yayasan Kita Penulis

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kebijakan Pemerintah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120).

Undang Undang Nomer 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bus trans kota Malang.

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132).

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Pemeriksaan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2012

UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Sumber Jurnal:

Abdul Kadir (2019), dengan judul penelitian Transportasi Publik Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Pustaka Setia

Budi, W. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Pross, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Esti Hartiyanti Putri, Moch. Saleh Soeady, Ainul Hayat (2011) evaluasi kebijakan peremajaan angkutan kota dalam upaya Peningkatan pelayanan public Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang.

Rizki Oktavianti, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si (2020) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang.

Sumber internet:

<https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Sesjen-Pelayanan-Di-Terminal-Arjosari-Harus-Ditingkatkan>

<https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kunjungi-Terminal-Arjosari,-Sesjen-Minta-Dishub-Jatim-Usulkan-Re-Design-Alur-Pergerakan-Penumpang-Di-Terminal>

<https://Dishub.Malangkota.Go.Id/>

Muhammad Fajaruddin Sumarna (2019) Rancang Bangun;Pemesanan Dan Pembayaranbus;Sisteminformasi<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/1>

23456789/48082, Diakses Tanggal 27 Mei 2019

Wahyuning, Caecilia Sri (2018) Studi Kelayakaan Rancang Bangun Bus Berdasarkan Kelelahan Fisik Dan Mental [Http://Eprints.Itenas.Ac.Id/Cgi/Oai2](http://Eprints.Itenas.Ac.Id/Cgi/Oai2), Diakses Tanggal 4 Desember 2018.

<https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Sesjen-Pelayanan-Di-Terminal-Arjosari-Harus-Ditingkatkan>

<https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kunjungi-Terminal-Arjosari,-SesjenMinta-Dishub-Jatim-Usulkan-Re-Design-Alur-Pergerakan-Penumpang-Di-Terminal>

<https://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kunjungi-Terminal-Arjosari,-Sesjen-Minta-Dishub-Jatim-Usulkan-Re-Design-Alur-Pergerakan-Penumpang-Di-Terminal>